



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2011

SALINAN

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan *millennium*, khususnya target 7C yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pati Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2011-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD-AMPL, adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
5. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
6. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
7. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
12. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
14. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
20. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum serta upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program dan aksi nyata Pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2011 sampai dengan 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;

- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS Tahun 2011-2015.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pati untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2015 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja SKPD, dan APBD Kabupaten Pati sampai dengan 2015.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Rencana kerja SKPD, APBD Kabupaten Pati, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Pati ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 dengan dana di luar APBD Kabupaten Pati, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi AMPL Kabupaten Pati.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Rencana kerja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melalui Tim Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

- (2) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (4) Tim Koordinasi AMPL Kabupaten Pati melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Pokja AMPL.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Tim Koordinasi AMPL Kabupaten Pati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Tim Koordinasi AMPL Kabupaten Pati.
- (7) Ketua Tim Koordinasi AMPL Kabupaten Pati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Pati 2011-2015 sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

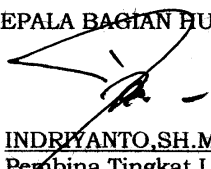
ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 842

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan tahun 2015 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Pati menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) tahun 2011-2015 sebagai instrument percepatan daerah dalam mencapai target *Millennium Development Goals*, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2010.

RAD AMPL Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan.
- Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah tahun 2011 – 2015.
- “Channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.
- Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.
- Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Pati yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target 7C MDGs 2015 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dalam suatu dokumen RAD AMPL meliputi:

- a. Penyediaan air minum rumah tangga.
- b. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun.
- c. Pengelolaan air limbah.
- d. Pengelolaan limbah rumah tangga.
- e. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengacu pada peran RAD AMPL untuk mendukung RAD MDGs, khususnya target 7c MDGs, dan bahwa RAD AMPL ini merupakan dokumen pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS dalam penyediaan akses air minum dan penyehatan lingkungan, maka cakupan RAD AMPL tidak termasuk pengelolaan sampah dan drainase.

Adapun ruang lingkup pengembangan kapasitas dalam dokumen RAD AMPL meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana program dan kegiatan.
- b. Peningkatan kualitas program dan kegiatan AMPL.
- c. Peningkatan dukungan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan AMPL.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- a. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat.
- b. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak.
- c. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS).
- d. Program pengelolaan lingkungan.
- e. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemda untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

Sistematika RAD AMPL Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah

1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

1.2.2 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan Pelayanan AMPL

1.2.3 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah

1.3 Permasalahan dan Tantangan

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2015

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target AMPL 2015

2.3 Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL 2011-2015

Bab III Pemantauan dan Evaluasi;

3.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

3.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Bab IV Penutup

Lampiran Matriks RAD AMPL

1.1 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan Dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 110^o.50' – 111^o.15' bujur timur dan 6^o.25' – 7^o.00' lintang selatan. Kabupaten Pati mempunyai batas wilayah sebelah utara: dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah barat: dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan: dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, sebelah timur: dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dari 58.448 ha lahan sawah dan 91.920 ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati dibagi menjadi 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan, 7.463 RT dan 1.464 RW. (Pati Dalam Angka Tahun 2010)

1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Sebagai kebutuhan pokok manusia, prasarana air bersih merupakan utilitas yang sangat strategis dalam penyediaannya. Selain untuk kebutuhan manusia, dihubungkan dengan fungsi kawasan, maka air juga digunakan untuk kegiatan industri, perdagangan/niaga, rekreasi dan sosial. Sistem prasarana air bersih di Kabupaten Pati meliputi embung, mata air, resevoir dan pipa-pipa pendistribusian.

Sarana dan prasarana air bersih yang ada di Kabupaten Pati berdasarkan RPJMD Tahun 2006 – 2011 adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Air Bersih

Prasarana air bersih dikelola oleh pemerintah kabupaten (PDAM) dan kelompok masyarakat. Jangkauan pelayanan air bersih melalui distribusi perpipaan yang dikelola oleh PDAM, masih terbatas pada wilayah perkotaan dengan kapasitas pelayanan sebesar 16.051 pelanggan atau 171.605 jiwa. PDAM juga melayani kebutuhan air bersih dengan sistim droping dengan menggunakan mobil tanki pada wilayah-wilayah rawan air bersih.

b. Air Permukaan Tanah

Air permukaan tanah di Kabupaten Pati berupa sungai-sungai yang berpotensi sebagai sumber air, seperti Sungai Sani, Simo, Kersulo, Bapoh, Tayu, Sat, Brati dan Juwana. Sedangkan sungai – sungai yang berada di Pati Selatan adalah Sungai Widodaren, Brati, Lembang, Godo, Gono, Kedonglo, dan Sentul.

c. Air Tanah

Potensi sumber air tanah di Kabupaten Pati bila diusahakan dapat dimanfaatkan untuk sumber air minum maupun pengairan. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber air tanah adalah sebagai berikut:

1. Widodaren Pucakwangi
2. Sendangsuko Pucakwangi
3. Bulu Pucakwangi
4. Lunggoh Pucakwangi
5. Maitan Tambakromo
6. Dogo Tambakromo
7. Pakis Tambakromo
8. Kluweh Kayen
9. Mbeketel Kayen
10. Lawang Sukolilo
11. Sumurkaranganyar Sukolilo
12. Baleadi Sukolilo
13. Duwan Sukolilo

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pati yaitu pada tahun 2008 jumlah penduduknya sebesar 1.256.182 jiwa, pada tahun 2009 jumlah penduduknya sebesar 1.265.225 jiwa dan pada tahun 2010 jumlah penduduknya sebesar 1.197.602 jiwa. Sedangkan berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk adalah 1.190.993 jiwa, ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 dan 2009.

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 terdapat di Kecamatan Pati sebanyak 102.873 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2010 terdapat di Kecamatan Gunungwungkal sebanyak 34.936 jiwa.

Tabel 1.1
BANYAKNYA PENDUDUK AKHIR TAHUN MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2008 – 2010

NO	KECAMATAN	TAHUN			
		2008	2009	2010	2010 ^{*)}
1	2	3	4	5	6
1	Sukolilo	90.377	90.442	84.915	84.356
2	Kayen	73.722	74.832	71.359	69.842
3	Tambakromo	50.037	50.091	47.910	47.774
4	Winong	59.386	59.594	49.985	49.208
5	Pucakwangi	51.709	51.693	41.339	41.180
6	Jaken	45.783	45.977	42.199	42.063
7	Batangan	40.952	41.039	40.896	40.732
8	Juwana	90.173	93.851	91.374	89.866
9	Jakenan	44.505	44.572	40.241	40.153
10	Pati	107.512	107.998	103.122	102.873
11	Gabus	55.587	55.728	51.875	51.744
12	Margorejo	54.109	54.786	55.842	55.580
13	Gembong	41.772	42.618	42.143	42.084
14	Tlogowungu	49.864	49.849	49.035	49.023
15	Wedarijaksa	58.270	58.336	57.524	57.451
16	Trangkil	60.724	60.644	59.284	59.160
17	Margoyoso	73.810	73.968	70.268	70.147
18	Gunungwungkul	36.670	37.269	35.059	34.936
19	Cluwak	44.287	44.769	42.485	42.314
20	Tayu	68.746	68.730	64.507	64.339
21	Dukuhseti	58.187	58.439	56.240	56.168
	JUMLAH	1.256.182	1.265.225	1.197.602	1.190.993

Sumber:

Pati Dalam Angka

^{*)} Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010

Pelayanan Kesehatan

Rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga. Adapun prioritas indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Menggunakan jamban sehat untuk buang air besar (BAB).

3. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah BAB.
4. Menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari.
5. Membuang sampah pada tempat yang disediakan.
6. Makan dengan gizi seimbang.
7. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil.
8. Menimbang balita / batita setiap bulan (minimal 8 kali setahun).
9. Tidak menyalah gunakan miras / napza (narkoba).
10. Anggota rumah tangga melakukan PSN.
11. Memberikan ASI Eksklusif (ASI saja) kepada bayi sampai usia 6 bulan.
12. Melakukan aktifitas fisik (berolah raga) setiap hari.
13. Menggunakan lantai rumah yang kedap air (bukan lantai tanah).
14. Menghuni rumah dengan kepadatan yang memenuhi syarat kesehatan.
15. Menjadi anggota JPK / Dana Sehat / Asuransi kesehatan lainnya.
16. Bebas asap rokok (anggota keluarga tidak ada yang merokok.)

Penentuan kriteria strata rumah tangga ditentukan dengan menghitung jumlah indikator yang telah dilaksanakan oleh keluarga meliputi:

- a. Sehat Pratama : indikator yang terpenuhi antara 1 s/d 5
- b. Sehat Madya : indikator yang terpenuhi antara 6 s/d 10
- c. Sehat Utama : indikator yang terpenuhi antara 11 s/d 15
- d. Sehat Paripurna : semua indikator dapat terpenuhi

Hasil survei indikator PHBS pada tahun 2009 terhadap 15.850 rumah yang sudah ber perilaku hidup bersih sehat sebanyak 10.987 rumah atau 69,32%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tertinggi ada di Puskesmas Pucakwangi II sebesar 90,21% dan terendah ada di Puskesmas Pucakwangi I sebesar 11,25%.

Tabel 1.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT
KABUPATEN PATI TAHUN 2009

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	RUMAH TANGGA		
			JUMLAH DIPANTAU	BER PHBS	%
1	2	3	4	5	6
1	Sukolilo	Sukolilo I	360	152	42,22
		Sukolilo II	280	159	56,79
2	Kayen	Kayen	360	66	18,33
3	Tambakromo	Tambakromo	720	606	84,17
4	Winong	Winong I	720	606	84,17
		Winong II	480	398	82,92
5	Pucakwangi	Pucakwangi I	320	36	11,25
		Pucakwangi II	480	433	90,21
6	Jaken	Jaken	840	707	84,17
7	Batangan	Batangan	720	545	75,69
8	Juwana	Juwana	1.160	958	82,59
9	Jakenan	Jakenan	920	640	69,57
10	Pati	Pati I	680	558	82,06
		Pati II	480	189	39,38
11	Gabus	Gabus I	520	245	47,12
		Gabus II	440	352	80,00
12	Margorejo	Margorejo	720	633	87,92
13	Gembong	Gembong	440	293	66,59
14	Tlogowungu	Tlogowungu	600	279	46,50
15	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	360	181	50,28
		Wedarijaksa II	360	218	60,56
16	Trangkil	Trangkil	570	455	79,82
17	Margoyoso	Margoyoso I	480	357	74,38
		Margoyoso II	400	308	77,00
18	Gunungwungkul	Gunungwungkul	600	398	66,33
19	Cluwak	Cluwak	520	388	74,62
20	Tayu	Tayu I	520	167	32,12
		Tayu II	320	269	84,06
21	Dukuhseti	Dukuhseti	480	391	81,46
JUMLAH			15.850	10.987	69,32

Sumber:

Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2009

Jumlah rumah pada tahun 2009 yang memenuhi kriteria rumah sehat adalah 68.086 rumah atau 67,08% dari 101.500 rumah yang diperiksa. Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat minimum komponen rumah dan sarana sanitasi dari 3 komponen (rumah, sarana sanitasi dan perilaku) di Kabupaten Pati pada kurun waktu tertentu.

Tabel 1.3
PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2009

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	RUMAH				
			JUMLAH SELURUHNYA	JUMLAH DIPERIKSA	% DIPERIKSA	JUMLAH SEHAT	% SEHAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukolilo	Sukolilo I	10.580	3.500	33,08	2.354	67,26
		Sukolilo II	9.596	3.500	36,47	2.164	61,83
2	Kayen	Kayen	17.410	3.500	20,10	2.145	61,29
3	Tambakromo	Tambakromo	12.054	3.500	29,04	2.109	60,26
4	Winong	Winong I	8.740	3.500	40,05	2.430	69,43
		Winong II	5.810	3.500	60,24	1.986	56,74
5	Pucakwangi	Pucakwangi I	8.601	3.500	40,69	2.767	79,06
		Pucakwangi II	8.502	3.500	41,17	2.644	75,54
6	Jaken	Jaken	11.271	3.500	31,05	2.655	75,86
7	Batangan	Batangan	11.172	3.500	31,33	2.154	61,54
8	Juwana	Juwana	22.269	3.500	15,72	2.322	66,34
9	Jakenan	Jakenan	12.082	3.500	28,97	2.408	68,80
10	Pati	Pati I	15.670	3.500	22,34	2.434	69,54
		Pati II	10.593	3.500	33,04	2.765	79,00
11	Gabus	Gabus I	7.918	3.500	44,20	2.314	66,11
		Gabus II	7.782	3.500	44,98	2.254	64,40
12	Margorejo	Margorejo	13.879	3.500	25,22	2.467	70,49
13	Gembong	Gembong	10.881	3.500	32,17	1.983	56,66
14	Tlogowungu	Tlogowungu	13.402	3.500	26,12	2.198	62,80
15	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	8.966	3.500	39,04	2.190	62,57
		Wedarijaksa II	5.987	3.500	58,46	2.209	63,11
16	Trangkil	Trangkil	15.932	3.500	21,97	1.876	53,60
17	Margoyoso	Margoyoso I	8.218	3.500	42,59	2.650	75,71
		Margoyoso II	8.389	3.500	41,72	2.439	69,69
18	Gunungwungkul	Gunungwungkal	9.428	3.500	37,12	2.865	81,86
19	Cluwak	Cluwak	12.215	3.500	28,65	2.675	76,43

20	Tayu	Tayu I	11.479	3.500	30,49	2.134	60,97
		Tayu II	5.845	3.500	59,88	2.329	66,54
21	Dukuhseti	Dukuhseti	14.812	3.500	23,63	2.166	61,89
JUMLAH (KAB/KOTA)			319.483	101.500	31,77	68.086	67,08

Sumber:

Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2009

Pelayanan Air Bersih

Hasil inspeksi terhadap air bersih pada rumah sehat pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 154.800 rumah dari jumlah seluruhnya 319.483 KK telah mengakses air bersih. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap air bersih adalah 48,45%.

Persentase keluarga memiliki akses air bersih pada tahun 2009 terdiri dari keluarga yang menggunakan air ledeng sebanyak 19,20%; sumur pompa tangan sebanyak 17,77%; sumber air sumur gali sebanyak 62,81%; penampungan air hujan sebanyak 0,07%, kemasan sebanyak 0,03% lainnya sebanyak 0,12%.

Tabel 1.4
PERSENTASE KELUARGA MEMILIKI AKSES AIR BERSIH
KABUPATEN PATI
TAHUN 2009

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Seluruhnya	Jumlah Diperiksa	% Diperiksa	AKSES AIR BERSIH							% AKSES AIR BERSIH						
						LEDENG	SPT	SGL	PAH	KEMASAN	LAINNYA	JUMLAH	LEDENG	SPT	SGL	PAH	KEMASAN	LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sukolilo	Sukolilo I	10.580	4.320	40,83	1.214	134	2.955	6	2	9	4.320	28,10	3,10	68,40	0,14	0,05	0,21	100
		Sukolilo II	9.596	1.627	16,95	463	87	1.042	12	-	23	1.627	28,46	5,35	64,04	0,74	-	1,41	100
2	Kayen	Kayen	17.410	2.409	13,84	376	868	1.124	14	-	27	2.409	15,61	36,03	46,66	0,58	-	1,12	100
3	Tambakromo	Tambakromo	12.054	1.841	15,27	332	283	1.220	4	-	2	1.841	18,03	15,37	66,27	0,22	-	0,11	100
4	Winong	Winong I	8.740	4.669	53,42	112	58	4.478	8	3	10	4.669	2,40	1,24	95,91	0,17	0,06	0,21	100
		Winong II	5.810	838	14,42	213	58	563	4	-	-	838	25,42	6,92	67,18	0,48	-	-	100
5	Pucakwangi	Pucakwangi I	8.601	530	6,16	342	54	117	8	1	8	530	64,53	10,19	22,08	1,51	0,19	1,51	100
		Pucakwangi II	8.502	813	9,56	311	-	487	5	-	10	813	38,25	-	59,90	0,62	-	1,23	100
6	Jaken	Jaken	11.271	1.332	11,82	453	124	752	-	1	2	1.332	34,01	9,31	56,46	-	0,08	0,15	100
7	Batangan	Batangan	11.172	2.983	26,70	977	129	1.875	-	2	-	2.983	32,75	4,32	62,86	-	0,07	-	100
8	Juwana	Juwana	22.269	13.931	62,56	8.227	2.675	3.025	-	4	-	13.931	59,06	19,20	21,71	-	0,03	-	100
9	Jakenan	Jakenan	12.082	4.283	35,45	534	824	2.917	8	-	-	4.283	12,47	19,24	68,11	0,19	-	-	100
10	Pati	Pati I	15.670	21.069	134,45	3.269	9.551	8.233	-	16	-	21.069	15,52	45,33	39,08	-	0,08	-	100
		Pati II	10.593	6.431	60,71	925	1.236	4.259	8	1	2	6.431	14,38	19,22	66,23	0,12	0,02	0,03	100
11	Gabus	Gabus I	7.918	4.851	61,27	124	338	4.373	12	2	2	4.851	2,56	6,97	90,15	0,25	0,04	0,04	100

		Gabus II	7.782	3.469	44,58	-	1.903	1.559	-	-	7	3.469	-	54,86	44,94	-	-	0,20	100
12	Margorejo	Margorejo	13.879	4.719	34,00	764	572	3.372	4	3	4	4.719	16,19	12,12	71,46	0,08	0,06	0,08	100
13	Gembong	Gembong	10.881	6.371	58,55	6.129	210	20	-	-	12	6.371	96,20	3,30	0,31	-	-	0,19	100
14	Tlogowungu	Tlogowungu	13.402	3.590	26,79	1.432	240	1.900	8	1	9	3.590	39,89	6,69	52,92	0,22	0,03	0,25	100
15	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	8.966	7.051	78,64	1.587	14	5.446	-	2	2	7.051	22,51	0,20	77,24	-	0,03	0,03	100
		Wedarijaksa II	5.987	2.941	49,12	-	581	2.357	-	-	3	2.941	-	19,76	80,14	-	-	0,10	100
16	Trangkil	Trangkil	15.932	17.143	107,60	-	1.865	15.276	-	-	2	17.143	-	10,88	89,11	-	-	0,01	100
17	Margoyoso	Margoyoso I	8.218	1.787	21,74	-	1.088	697	-	2	-	1.787	-	60,88	39,00	-	0,11	-	100
		Margoyoso II	8.389	5.207	62,07	234	876	4.089	-	-	8	5.207	4,49	16,82	78,53	-	-	0,15	100
18	Gunungwungkul	Gunungwungkul	9.428	2.936	31,14	785	55	2.072	-	-	24	2.936	26,74	1,87	70,57	-	-	0,82	100
19	Cluwak	Cluwak	12.215	3.648	29,86	475	12	3.153	-	-	8	3.648	13,02	0,33	86,43	-	-	0,22	100
20	Tayu	Tayu I	11.479	8.974	78,18	-	1.008	7.964	-	2	-	8.974	-	11,23	88,75	-	0,02	-	100
		Tayu II	5.845	4.160	71,17	-	267	3.881	-	-	12	4.160	-	6,42	93,29	-	-	0,29	100
21	Dukuhseti	Dukuhseti	14.812	10.877	73,43	437	2.405	8.028	-	3	4	10.877	4,02	22,11	73,81	-	0,03	0,04	100
JUMLAH			319.483	154.800	48,45	29.715	27.515	97.234	101	45	190	154.800	19,20	17,77	62,81	0,07	0,03	0,12	100

Sumber:

Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2009

Kabupaten Pati sebagai wilayah yang memiliki masalah dalam ketersediaan air bersih terutama pada saat musim kemarau. Pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Bening di Kabupaten Pati sudah mencakup 14 kecamatan dari sebanyak 21 kecamatan.

Pada tahun 2010 cakupan pelayanan air bersih dari PDAM mencapai 138.028 jiwa atau 39,78% dari daerah cakupan pelayanan yaitu 347.016 jiwa jumlah penduduk pada 14 Kecamatan, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 dari total penduduk 1.197.602 jiwa baru dilayani oleh PDAM sebesar 11,53%.

Pada tahun 2009 cakupan pelayanan air bersih dari PDAM mencapai 135.410 jiwa atau 39,02% dari daerah cakupan pelayanan yaitu 347.016 jiwa jumlah penduduk pada 14 Kecamatan, sedangkan berdasarkan total penduduk pada tahun 2009 sebanyak 1.265.225 jiwa baru dilayani oleh PDAM sebesar 10,70%.

Pada tahun 2008 cakupan pelayanan air bersih dari PDAM mencapai 131.620 jiwa atau 40,20% dari daerah cakupan pelayanan yaitu 327.394 jiwa jumlah penduduk pada 14 Kecamatan, sedangkan berdasarkan total penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.256.182 jiwa baru dilayani oleh PDAM sebesar 10,48%.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat perkembangan pelayanan pelanggan dari tahun 2008 – 2010 sebesar 6.408 jiwa atau 4,87%.

Tabel 1.5
DATA PELAYANAN PELANGGAN
PDAM TIRTA BENING KABUPATEN PATI
TAHUN 2008 – 2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Administrasi)	Jumlah Cakupan Pelayanan	Jumlah Pelanggan					
				Sambungan			Penduduk Terlayani	% Cakupan Pelayanan	
				SR	HU	Total		Administrasi	Daerah Pelayanan
				(Unit)	(Unit)	(Unit)		(Jiwa)	(Jiwa)
1	2008	1.256.182	327.394	19.620	139	19.759	131.620	10,48	40,20
2	2009	1.265.225	347.016	20.285	137	20.422	135.410	10,70	39,02
3	2010	1.197.602	347.016	20.738	136	20.874	138.028	11,53	39,78

Sumber: PDAM Tirta Bening Pati

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih juga dilakukan oleh Program Pamsimas di Kabupaten Pati. Pada tahun 2008 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses di 9 Desa yang terdiri dari 26 Dusun, dengan daerah cakupan 19.283 jiwa dan yang terlayani air bersih adalah 7.090 jiwa atau 36.77%, sedangkan dari total penduduk tahun 2008 sebanyak 1.256.182 jiwa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 0,52%.

Pada tahun 2009 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses di 11 Desa yang terdiri dari 40 Dusun, dengan daerah cakupan 26.503 jiwa dan yang terlayani air bersih adalah 5.260 jiwa atau 19,85%, sedangkan dari total penduduk tahun 2009 sebanyak 1.265.225 jiwa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 0,42%.

Pada tahun 2010 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses di 16 Desa reguler dan 2 desa replikasi yang terdiri dari 69 Dusun, dengan daerah cakupan 50.510 jiwa dan yang terlayani air bersih adalah 26.574 jiwa atau 52,61%, sedangkan dari total penduduk akhir tahun 2010 sebanyak 1.197.602 jiwa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 2,22%.

Hasil yang telah dilakukan Program Pamsimas untuk penyediaan sarana air bersih selama kurun waktu tahun 2008 – 2010 pada 38 desa dengan jumlah penduduk 96.296 Jiwa telah terlayani air bersih sebanyak 38.324 jiwa atau 39,80%.

Tabel 1.6
DATA PAMSIMAS BIDANG SARANA AIR MINUM
KABUPATEN PATI TAHUN 2008 – 2010

NO	Tahun	SARANA AIR MINUM									
		Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk Desa	Jumlah Dusun Yang Dilayani	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	% Cakupan Pelayanan		PELAYANAN	
								Administrasi	Daerah Pelayanan	SR	HU
1	2	3		3	4	5	6	7	8	11	12
1	2008	1.256.182	9	26	19.283	14	6.490	0,52	33,66	1.208	-
2	2009	1.265.225	11	40	26.503	24	5.260	0,42	19,85	1.052	-

3	2010	1.197.602	18	69	50.510	34	26.574	2,22	52,61	5.454	56
TOTAL			38	135	96.296	72	38.324		39,80	7714	56

Sumber:

DMAC Pamsimas Kabupaten Pati

Sedangkan perkembangan PAB yang telah dibangun di Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2010 telah melayani sebanyak 65.295 jiwa atau 5,45% dari jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 1.197.602 jiwa.

Tabel 1.7
Pembangunan Prasarana Air Bersih
Kabupaten Pati
Tahun 2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk	SR (UNIT)	Penduduk (Jiwa)	HU (UNIT)	Penduduk (Jiwa)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Prosentase
1	2010	1.197.602	2.830	14.375	260	50.920	65.295	5,45

Sumber:

Hasil Analisis Tim Pokja RAD AMPL Kabupaten Pati

Pelayanan Penyehatan Lingkungan

Hasil inspeksi terhadap sarana sanitasi dasar pada tahun 2009 terhadap 174 KK di Kabupaten Pati menunjukkan data kepemilikan jamban sebanyak 119 KK atau 68,39% dan dinyatakan sehat sebanyak 119 KK atau 68,39%; sarana pembuangan sampah sebanyak 105 KK atau 60,34% dan dinyatakan sehat sebanyak 105 KK atau 60,34% dan sarana pengelolaan air limbah sebanyak 105 KK atau 60,34% dan dinyatakan sehat sebanyak 105 KK atau 60,34%.

Tabel 1.8
KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2009

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KK	JAMBAAN					TEMPAT SAMPAH					PENGELOLAAN AIR LIMBAH					KET
				JUMLAH KK DIPERIKSA	JUMLAH KK MEMILIKI	JUMLAH SEHAT	% KK MEMILIKI	% SEHAT	JUMLAH KK DIPERIKSA	JUMLAH KK MEMILIKI	JUMLAH SEHAT	% KK MEMILIKI	% SEHAT	JUMLAH KK DIPERIKSA	JUMLAH KK MEMILIKI	JUMLAH SEHAT	% KK MEMILIKI	% SEHAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sukolilo	Sukolilo I	13.241	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
		Sukolilo II	12.283	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
2	Kayen	Kayen		6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
3	Tambakromo	Tambakromo	16.103	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
4	Winong	Winong I	8.622	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
		Winong II	8.343	6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
5	Pucakwangi	Pucakwangi I	962	6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
		Pucakwangi II	4.554	6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
6	Jaken	Jaken	14.896	6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
7	Batangan	Batangan	12.727	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
8	Juwana	Juwana	26.067	6	4	4	66,67	66,67	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
9	Jakenan	Jakenan		6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
10	Pati	Pati I	16.785	6	5	5	83,33	83,33	6	5	5	83,33	83,33	6	5	5	83,33	83,33	
		Pati II		6	5	5	83,33	83,33	6	5	5	83,33	83,33	6	5	5	83,33	83,33	
11	Gabus	Gabus I	9.110	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	

		Gabus II	10.123	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	6	3	3	50,00	50,00	
12	Margorejo	Margorejo	16.794	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
13	Gembong	Gembong	13.794	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
14	Tlogowungu	Tlogowungu	15.404	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
15	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	8.303	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
		Wedarijaksa II	6.719	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
16	Trangkil	Trangkil	18.418	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
17	Margoyoso	Margoyoso I	11.071	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
		Margoyoso II		6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
18	Gunungwungkul	Gunungwungkul	11.937	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
19	Cluwak	Cluwak	12.960	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
20	Tayu	Tayu I	13.064	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
		Tayu II	7.551	6	5	5	83,33	83,33	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
21	Dukuhseti	Dukuhseti	17.911	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	6	4	4	66,67	66,67	
JUMLAH			307.742	174	119	119	68,39	68,39	174	105	105	60,34	60,34	174	105	105	60,34	60,34	

Sumber:

Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2009

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban) juga dilakukan oleh Program Pamsimas di Kabupaten Pati. Pada tahun 2008 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses jamban di 9 Desa pada 14 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 1.773 siswa dan yang terlayani jamban sebanyak 14 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 1.773 siswa atau 100% dari jumlah siswa. Sedangkan dari total penduduk tahun 2008 sebanyak 1.256.182 jiwa siswa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 0,14%.

Pada tahun 2009 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses jamban di 11 Desa pada 20 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 2.636 siswa dan yang terlayani jamban sebanyak 17 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 2.296 siswa atau 87,10% dari jumlah siswa. Sedangkan dari total penduduk tahun 2009 sebanyak 1.265.225 jiwa siswa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 0,18%.

Pada tahun 2010 Program Pamsimas telah melakukan penyediaan akses jamban di 16 Desa reguler dan 2 desa replikasi pada 37 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 4.668 siswa dan yang terlayani jamban sebanyak 37 SD/MI dengan jumlah siswa SD/MI 4.668 siswa atau 100% dari jumlah siswa. Sedangkan dari total penduduk akhir tahun 2010 sebanyak 1.197.602 jiwa siswa yang berlayani oleh Program Pamsimas sebesar 0,39%.

Hasil yang telah dilakukan Program Pamsimas untuk penyediaan sarana sanitasi dasar selama kurun waktu tahun 2008 – 2010 pada 38 desa dengan jumlah siswa SD/MI sebanyak 9.077 siswa telah terlayani sarana sanitasi dasar sebanyak 8.737 siswa atau 96,25%.

Tabel 1.9
DATA PAMSIMAS BIDANG SANITASI
KABUPATEN PATI TAHUN 2008 - 2010

NO	Tahun	SANITASI									
		Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Jumlah SD/MI di Desa	Jumlah Murid	SD/MI Yang Dilayani	Jumlah Murid Yang Dilayani	% Cakupan Pelayanan		Jamban	Tempat Cuci Tangan
								Admini strasi	Murid Yang Dilayani		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	2008	1.256.182	9	14	1.773	14	1.773	0,14	100,00	13	14
2	2009	1.265.225	11	20	2.636	17	2.296	0,18	87,10	19	68
3	2010	1.197.602	18	37	4.668	37	4.668	0,39	100,00	19	107
	TOTAL		38	71	9.077	68	8.737		96,25	51	189

Sumber:

DMAC Pamsimas Kabupaten Pati

Realisasi Anggaran APBD Bidang AMPL

Pada tahun 2008 realisasi APBD Kabupaten Pati untuk AMPL adalah sebesar Rp. 7.805.186.753,- atau 0,76% dari total APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.027.833.039.085.

Pada tahun 2009 realisasi APBD Kabupaten Pati untuk AMPL adalah sebesar Rp. 8.788.900.920,- atau 0,85% dari total APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.032.302.719.200.

Pada tahun 2010 realisasi APBD Kabupaten Pati untuk AMPL adalah sebesar Rp. 6.702.687.176,- atau 0,61% dari total APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.097.979.483.000.

Alokasi dana APBD Kabupaten Pati tersebut tersebar pada beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Tabel 1.10
Realisasi Anggaran Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Pati
Tahun 2008 - 2010

No	SKPD Pelaksana	APBD 2008	APBD 2009	APBD 2010
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	1.470.314.500	1.844.428.920	457.912.520
2	Dinas Pekerjaan Umum	3.264.287.953	4.227.517.500	2.983.266.346
3	Bappeda	2.092.294.000	1.448.500.000	976.375.000
4	Badan LH	372.540.300	518.084.500	638.433.550
5	Bapermades	55.000.000	302.500.000	981.750.000
6	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	550.750.000	447.870.000	664.949.760
JUMLAH		7.805.186.753	8.788.900.920	6.702.687.176
TOTAL APBD		1.027.833.039.085	1.032.302.719.200	1.097.979.483.000
% Realisasi Terhadap APBD		0,76%	0,85%	0,61%

Sumber:

Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Pati

Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Kebijakan nasional terhadap pembangunan AMPL merupakan salah satu prioritas dari sebelas prioritas nasional yang bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Untuk kebijakan nasional terhadap pembangunan AMPL terdapat dalam prioritas 3: Kesehatan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga

secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015.

Untuk target AMPL Nasional terdapat pada program kesehatan masyarakat yang meliputi: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014.

Tujuan ke-7 Pembangunan Millennium, khususnya target 7C menyebutkan bahwa target 7C adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015. Berdasarkan target 7C tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian target 7C tersebut adalah:

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
 - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
 - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
 - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Dalam Tujuan Pembangunan Millennium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.

Selanjutnya, SPM air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (dengan target SPM 5%).

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- Air ledeng meteran
- Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan
- Air Hujan

Status capaian kinerja pelayanan air minum provinsi Jawa Tengah adalah 53,83%, sedangkan sanitasi dasar adalah 58,8%.

Target MDGs air minum Provinsi Jawa Tengah adalah 75% sedangkan target sanitasi adalah 68%. Dengan demikian, pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Pati harus dapat berkontribusi dalam mencapai target Provinsi Jawa Tengah baik untuk air minum maupun untuk air limbah.

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Pati dengan menggunakan indikator target 7C tersebut pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. 27,80% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. 32,84% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
 - b. 16,30% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.
2. 47% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:

Dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Tengah tahun 2010, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pati relatif sudah melampaui capaian provinsi dan apabila dibandingkan capaian nasional, Kabupaten Pati relatif masih tertinggal. Sedangkan untuk capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pati masih relatif tertinggal dari capaian provinsi dan nasional.

Status capaian kinerja AMPL Kabupaten Pati ditampilkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.11
Status Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Pati
Tahun 2010

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM Provinsi (%)	Target MDGs- Kab Pati (%)
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2014	2015
(a)	(b)	(c)			(d)			(e)			(f)	(g)
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			27,8% (332.933 jiwa)			23.46		47.71		75.00	63,90% (779.530 jiwa)
	a. Perkotaan			32,84% (119.640 jiwa)			38.00		49.82			66,42% (246.485 jiwa)
	b. Perdesaan			16,30% (135.827)			16.30		45.72			58,15% (493.590)

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM Provinsi (%)	Target MDGs- Kab Pati (%)
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2014	2015
(a)	(b)	(c)			(d)			(e)			(f)	(g)
				jiwa)								jiwa)
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			47,00% (562.873 jiwa)			57,00		51.19		68.00	73,50% (896.643 jiwa)

Catatan: data Kabupaten Pati tahun 2010 dan data Provinsi Jawa Tengah bersumber dari RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah 2011-2015

Target Kinerja AMPL Kabupaten Pati Tahun 2015 berdasarkan MDGs

Penetapan target kinerja AMPL 2015 didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pati. Target kinerja AMPL 2015 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil perhitungan/perkiraan target 7C MDGs.

Target 7C MDGs (AMPL) di Kabupaten Pati dihitung dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan 2015. Sehingga target MDGs Kabupaten Pati berdasarkan capaian tahun 2010 sebesar 779.530 jiwa atau 63,90% untuk air minum dan berdasarkan capaian tahun 2010 sebesar 896.643 jiwa atau 73,50% untuk sanitasi.

Berdasarkan status kinerja AMPL tahun 2010 maka perkiraan target 7C MDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12
TARGET KINERJA APML BERDASARKAN MDGs
KABUPATEN PATI
TAHUN 2011 - 2015

No	Indikator	Capaian 2010		Target MDGs 2015		Selisih Target MDGs	
1	Jumlah Penduduk	1.197.602	jiwa	1.219.922	jiwa		
	a. Perkotaan	364.311	jiwa	371.100	jiwa		
	b. Perdesaan	833.291	jiwa	848.822	jiwa		
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	27,80	%	63,90	%		
		332.933	jiwa	779.530	jiwa	446.597	jiwa
	a. Perkotaan	32,84	%	66,42	%		
		119.640	jiwa	246.485	jiwa	126.845	jiwa

	b. Perdesaan	16,30	%	58,15	%		
		135.827	jiwa	493.590	jiwa	357.763	jiwa
3	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	47,00	%	73,50	%		
		562.873	jiwa	896.643	jiwa	333.770	jiwa

Sumber:

Hasil Analisis Tim Pokja RAD AMPL Kabupaten Pati

1.2.2 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan Pelayanan AMPL

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2006 – 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 2006-2011, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan satu tahun transisi yaitu tahun 2012. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Pati tahun 2006 - 2011 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati tahun 2006-2026, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan kurun waktu 20 tahun.

Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2006-2011 adalah :

1. Strategi Percepatan

Memfokuskan pada percepatan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap fungsi sesuai kewenangan daerah, dari yang telah berjalan selama ini. Serta dalam rangka mengikuti perkembangan globalisasi dan perkembangan peraturan-peraturan yang baru.

2. Strategi Pemerataan

Menonjolkan proporsi pembangunan daerah dilihat dari aspek fungsi, wilayah dan anggaran yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan menjaga keseimbangan program-program pembangunan

3. Strategi Kestinambungan

Bertujuan mewujudkan serangkaian kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan mengantisipasi segala gejala dan dampak perkembangan pembangunan melalui tugas dan fungsi yang terkoordinasi, tersinkronisasi serta terintegrasi secara proporsional.

4. Strategi Interkoneksi

Bertujuan memaduserasikan serangkaian kegiatan pembangunan dari pemangku kepentingan pembangunan serta dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, melalui pengembangan dan penyempurnaan berbagai mekanisme dan prosedur pengelolaan pembangunan.

5. Strategi Pemberdayaan

Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam setiap gerak pembangunan.

Berdasarkan Strategi RPJMD Kabupaten Pati terdapat beberapa kebijakan yang berhubungan dengan AMPL yang meliputi:

1. Urusan Kesehatan

- a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini.
- b. Peningkatan kualitas sarana kesehatan dengan memprioritaskan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan.

2. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air.
- b. Mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang lestari.

- c. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang mendorong peningkatan produksi pertanian.
 - d. Menjaga pelestarian daerah resapan air.
- 3. Urusan perumahan
 - a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan.
 - b. Pemenuhan pelayanan kebersihan.
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman terutama di kawasan perkotaan.
- 4. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
 - c. Peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - d. Peningkatan upaya sadar lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Peningkatan peran pemerintahan desa dalam fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Peningkatan kemampuan pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong.

1.2.3 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu informasi untuk melakukan analisis kebutuhan investasi pelayanan AMPL di Kabupaten Pati. Berikut ini adalah tabel perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2011 – 2015 dengan perhitungan berdasarkan penduduk tahun 2010, rata-rata pertumbuhan 0,37% per tahun selama kurun waktu tahun 2000 - 2010.

Tabel 1.13
PERKIRAAN BANYAKNYA PENDUDUK AKHIR TAHUN MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2011 - 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukolilo	84.915	85.229	85.545	85.861	86.179	86.498
2	Kayen	71.359	71.623	71.888	72.154	72.421	72.689
3	Tambakromo	47.910	48.087	48.265	48.444	48.623	48.803
4	Winong	49.985	50.170	50.356	50.542	50.729	50.917
5	Pucakwangi	41.339	41.492	41.645	41.800	41.954	42.109
6	Jaken	42.199	42.355	42.512	42.669	42.827	42.985
7	Batangan	40.896	41.047	41.199	41.352	41.505	41.658
8	Juwana	91.374	91.712	92.051	92.392	92.734	93.077
9	Jakenan	40.241	40.390	40.539	40.689	40.840	40.991
10	Pati	103.122	103.504	103.887	104.271	104.657	105.044
11	Gabus	51.875	52.067	52.260	52.453	52.647	52.842
12	Margorejo	55.842	56.049	56.256	56.464	56.673	56.883
13	Gembong	42.143	42.299	42.455	42.613	42.770	42.928
14	Tlogowungu	49.035	49.216	49.399	49.581	49.765	49.949
15	Wedarijaksa	57.524	57.737	57.950	58.165	58.380	58.596
16	Trangkil	59.284	59.503	59.724	59.944	60.166	60.389
17	Margoyoso	70.268	70.528	70.789	71.051	71.314	71.578
18	Gunungwungkul	35.059	35.189	35.319	35.450	35.581	35.712
19	Cluwak	42.485	42.642	42.800	42.958	43.117	43.277
20	Tayu	64.507	64.746	64.985	65.226	65.467	65.709
21	Dukuhseti	56.240	56.448	56.657	56.867	57.077	57.288
JUMLAH		1.197.602	1.202.033	1.206.481	1.210.945	1.215.425	1.219.922

Sumber:

Hasil Analisis Tim Pokja RAD AMPL Kabupaten Pati

Asumsi Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Rata-rata Pertumbuhan selama 2000 - 2010 adalah 0,37%

Analisis kebutuhan investasi ditujukan untuk mengidentifikasi besarnya kebutuhan investasi dan potensi sumber-sumber investasi dalam lima tahun mendatang dalam rangka mencapai target pelayanan air minum sesuai dengan target MDGs.

Perkiraan kebutuhan investasi untuk air minum dan sanitasi di Kabupaten Pati selama tahun 2011 – 2015 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 243.734.262.000,- atau 818.379 jiwa yang terdiri dari investasi air minum sebesar Rp. 193.668.781.000,- atau 484.609 jiwa yang meliputi perkotaan sebesar Rp. 56.835.842.000,- atau 126.845 jiwa dan perdesaan sebesar Rp. 136.832.938.000,- atau 357.763 jiwa, sedangkan investasi untuk sanitasi adalah sebesar Rp. 50.065.481.000,- atau 333.770 jiwa. Rincian perkiraan kebutuhan investasi untuk air minum dan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14
PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI AIR MINUM DAN SANITASI
KABUPATEN PATI
TAHUN 2011 – 2015
(000)

No	Indikator	Perkiraan Kebutuhan Investasi Tahun 2011 - 2015			
		Total	Pendekatan Berbasis Kelembagaan	Pendekatan Berbasis Masyarakat	Mix: Pendekatan Berbasis Kelembagaan dan Masyarakat
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	193.668.781	124.625.747	43.193.034	25.850.000
	Jiwa	484.609	295.400	123.409	65.800
	a. Perkotaan	56.835.842	55.980.000	855.842	
	Jiwa	126.845	124.400	2.445	
	PDAM		55.980.000		
	Jiwa		124.400		
	Masyarakat/Stakeholders			855.842	
	Jiwa			2.445	
	b. Perdesaan	136.832.938	68.645.747	42.337.191	25.850.000
	Jiwa	357.763	171.000	120.963	65.800
	DPU		11.270.747		
	Jiwa		43.500		
	Program Pamsimas (DPU, Bapermades, Masyarakat)				25.850.000
	Jiwa				65.800
	PDAM		57.375.000		
	Jiwa		127.500		

	Masyarakat/Stakeholders			42.337.191	
	Jiwa			120.963	
2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan	50.065.481	13.564.978	35.000.503	1.500.000
	Jiwa	333.770	90.433	233.337	10.000
	DPU	13.564.978	13.564.978		
	Jiwa	90.433	90.433		
	Bapermades	1.500.000			1.500.000
	Jiwa	10.000			10.000
	Masyarakat/Stakeholders	35.000.503		35.000.503	
	Jiwa	233.337		233.337	
Total Kebutuhan Investasi		243.734.262	138.190.725	78.193.537	27.350.000
	Jiwa	818.379	385.833	356.745	75.800

Sumber:

Hasil Analisis Tim Pokja RAD AMPL Kabupaten Pati

1.3 Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan Utama Pelayanan AMPL

Permasalahan dan tantangan Kabupaten Pati dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Teknis:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Terbatasnya sumber mata air di desa/kelurahan yang mendapat Program PAMSIMAS maupun DAK;
- Di luar jaringan perpipaan, embung dan sungai, saat ini ada opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam pengeboran dan airnya payau;
- Kebocoran air PDAM masih cukup tinggi, pada tahun 2009 sebesar 21,65%;
- Belum semua kecamatan terlayani PDAM (baru terlayani 14 kecamatan dari 21 kecamatan).

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Sebagian sumber air yang ada kualitas airnya masih rendah;
- b) Kondisi debit sumur dalam PDAM terus menurun dari tahun ke tahun;
- c) Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan.

2) Sosial:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Minat masyarakat untuk berlangganan air bersih dari PDAM masih rendah, karena harga dirasakan masih mahal;
- b) Kesadaran masyarakat terutama di perdesaan untuk melakukan penerapan praktek hidup bersih dan higienis (PHBS) masih terbatas;
- c) Masyarakat masih menganggap kebutuhan air minum dan sanitasi merupakan tugas dari pemerintah untuk menyediakannya;
- d) Masih rentannya penyakit yang disebabkan karena kualitas air minum dan sanitasi.

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Daerah cakupan pelayanan PDAM masih banyak yang belum terlayani;
- b) Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS;
- c) Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak;
- d) Tingginya jumlah penduduk yang memerlukan akses air minum dan sanitasi layak sampai dengan 2015.

3) Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Kualitas lingkungan hidup masih rendah khususnya untuk sanitasi dasar;
- b) Masih tingginya BABS yang ada pada masyarakat;
- c) Masih tingginya penyakit yang disebabkan karena masalah AMPL.

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan;
- b) Pola hidup yang ada pada masyarakat yang masih rendah untuk AMPL;
- c) Bagaimana meningkatkan sosialisasi manfaat dari AMPL yang layak.

4) Kelembagaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat khususnya di perdesaan;
- b) Tingkat pelayanan PDAM masih rendah pada tahun 2009 sebesar 39,02% dari cakupan daerah pelayanan di 14 kecamatan;
- c) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS;
- d) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- b) Masih terbatasnya penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan PDAM;
- c) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5) Pembiayaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Terbatasnya alokasi APBD untuk AMPL, rata-rata dalam tiga tahun terakhir ini adalah hanya 0,74 %.
- b) Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan AMPL;
- c) Tingginya nilai investasi untuk membangun sistem baru pada daerah pelayanan PDAM.

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor untuk pembangunan air minum dan sanitasi;
- b) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
- c) Bidang AMPL belum menjadi prioritas dari masyarakat;
- d) Masih banyaknya daerah cakupan pelayanan yang belum terlayani PDAM.

Isu Strategis Pelayanan AMPL

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut maka isu strategis dalam penyediaan AMPL Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya cakupan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
- b. PDAM belum dapat menjangkau semua daerah cakupan pelayanan.
- c. Belum semua penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS.
- d. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih rendah.
- e. Pelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan AMPL belum dilakukan secara optimal.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2015

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelayanan AMPL adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya khususnya bidang AMPL.

Tujuan pembangunan AMPL di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan daerah cakupan pelayanan PDAM.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS.
5. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang AMPL.

Sasaran pembangunan AMPL di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari tahun 2010 sebesar 332.933 jiwa atau 27,80% menjadi sebesar 779.530 jiwa atau 63,90% pada tahun 2015.
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari tahun 2010 sebesar 562.873 jiwa atau 47% menjadi sebesar 896.643 jiwa atau 73,50% pada tahun 2015.
3. Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh PDAM sebesar 25.009 SR atau 125.047 jiwa pada tahun 2015.
4. Meningkatnya cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS, dari tahun 2010 sebesar 831.178 jiwa atau 69,32% menjadi 1.032.786 jiwa atau 84,66% pada tahun 2015.
5. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang AMPL dari tahun 2010 sebesar 38 BP SPAM menjadi 112 BP SPAM pada tahun 2015.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL

Kabupaten Pati

Tahun 2011 - 2015

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari tahun 2010 sebesar 332.933 jiwa atau 27,80% menjadi sebesar 779.530 jiwa atau 63,90% pada tahun 2015	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	35,02% (420.952 Jiwa)	42,24% (509.617 Jiwa)	49,46% (598.933 Jiwa)	56,68% (688.903 Jiwa)	63,90% (779.530 Jiwa)
			Tambahan cakupan di perkotaan	39,56% (142.643 Jiwa)	46,27% (167.479 Jiwa)	52,99% (192.497 Jiwa)	59,70% (217.697 Jiwa)	66,42% (243.082 Jiwa)
			Tambahan cakupan di perdesaan	24,67% (207.579 Jiwa)	33,04% (279.035 Jiwa)	41,41% (351.017 Jiwa)	49,78% (423.527 Jiwa)	58,15% (496.569 Jiwa)
2	Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari tahun 2010 sebesar 562.873 jiwa atau 47% menjadi sebesar 896.643 jiwa atau 73,50% pada tahun 2015	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	52,30% (628.663 Jiwa)	57,60% (694.933 Jiwa)	62,90% (761.684 Jiwa)	68,20% (828.920 Jiwa)	73,50% (896.643 Jiwa)
3	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh PDAM 25.009 SR atau 125.047 jiwa pada tahun 2015	penambahan jumlah sambungan rumah	5.002 SR (25.009 Jiwa)	5.002 SR (25.009 Jiwa)	5.002 SR (25.009 Jiwa)	5.002 SR (25.009 Jiwa)	5.002 SR (25.009 Jiwa)
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS, dari tahun 2010 sebesar 831.178 jiwa atau 69,32% menjadi 1.032.786 jiwa atau 84,66% pada tahun 2015	Cakupan penduduk yang menerapkan PHBS	72,39% (870.128 Jiwa)	75,46% (910.362 Jiwa)	78,52% (950.882 Jiwa)	81,59% (991.690 Jiwa)	84,66% (1.032.786 Jiwa)
5	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan						
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang AMPL	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang AMPL dari tahun 2010 sebesar 38 BP SPAM menjadi 112 BP SPAM pada tahun 2015	Kelembagaan BP SPAM dalam pembangunan AMPL	38 BP SPAM	54 BP SPAM	72 BP SPAM	92 BP SPAM	112 BP SPAM

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target AMPL 2015

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target AMPL pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target AMPL

Kabupaten Pati

Tahun 2011 - 2015

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Memprioritaskan program-program dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fasilitasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
2	Meningkatkan prasarana dan sarana AMPL	Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan AMPL, khususnya di perdesaan
3	Meningkatkan keterpaduan pembangunan AMPL dan mendorong partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan AMPL	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan AMPL melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sejak perencanaan sampai dengan evaluasi hasil
4	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Memperkuat pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan AMPL	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan AMPL

2.3. Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL 2011-2015

Pendanaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Pati dan PDAM Kabupaten Pati serta stakeholders bidang AMPL.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyediaan AMPL selama 5 tahun yaitu tahun 2011 – 2015 untuk mencapai target MDGs dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL
Kabupaten Pati Tahun 2011 – 2015

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Memprioritaskan program-program dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fasilitas pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat. 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. 2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat. 3. Upaya penyehatan lingkungan permukiman. 4. Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). 5. Inspeksi sanitasi sarana air minum dan sanitasi. 6. Program pamsimas komponen B. 7. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
			Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 2. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.
2	Meningkatkan prasarana dan sarana AMPL	Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan AMPL, khususnya di perdesaan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 2. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan. 3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Fasilitasi pendukung kegiatan WISMP.
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa. 2. Peningkatan Distribusi Air Baku.

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Pengelolaan program nasional Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
			Program penambahan SR PDAM	1. Penambahan sambungan rumah pada daerah cakupan pelayanan
			Program perencanaan sosial dan budaya	1. Bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Pamsimas Kab. Pati
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya. 2. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
3	Meningkatkan keterpaduan pembangunan AMPL dan mendorong partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan AMPL	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan AMPL melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sejak perencanaan sampai dengan evaluasi hasil	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Bidang PU/Cipta Karya. 2. Penyusunan DED sistem penyediaan air minum (SPAM). 3. Pendampingan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). 4. Penyusunan DED dan masterplan air limbah. 5. Penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. 6. Penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas. 7. Perencanaan teknis manajemen persampahan dan DED. 8. Penyusunan master plan drainase.
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pembinaan Perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air. 2. Implementasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Perencanaan dan Pengelolaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). 2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Prasarana Air Bersih Pedesaan.

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
			Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1. Penyusunan studi kelayakan pembangunan embung.
			Program Perencanaan Tata Ruang	1. Rencana tata ruang prioritas pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Margoyoso. 2. Penyusunan rencana tata ruang kawasan rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Studi perencanaan pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Pati. 4. Penyusunan studi identifikasi kawasan kumuh perkotaan.
4	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Memperkuat pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. 2. Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih. 3. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. 2. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA. 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA. 4. Konservasi Sumber Daya Air dan Pwengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air (DAK). 5. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber - Sumber Air (DAK). 6. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (DAK).
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan. 2. Penyediaan kotak pengaduan informasi lingkungan. 3. Penyusunan data dan informasi lingkungan. 4. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
				5. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah (DAK). 6. Peningkatan pembelajaran lingkungan hidup (cukai).
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pengkajian dampak lingkungan (cukai).
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH (CUKAI).
5	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan AMPL	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan AMPL	Program Bantuan Sosial	1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas Kab. Pati.
			Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	1. Pelembagaan BP SPAM Pamsimas.
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Pembangunan sarana dan prasarana umum pedesaan (BOP Pamsimas). 2. Pengadaan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) Replikasi Pamsimas Kab. Pati. 3. Pendamping Program percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
			Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	1. Bantuan Jamban Masyarakat P2MBG.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL (7C MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Pati. Pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 7C *Millenium Development Goals* (MDG's) Kabupaten Pati pada lembaga pemerintah daerah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target 7C MDG's.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 7C MDG's Kabupaten Pati juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Pati tahun 2011 – 2015 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 7C MDG's Kabupaten Pati di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Tim Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Pati maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target 7C MDG's.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- a. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2015.
- b. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RAD AMPL.
- c. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.

3.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Pokja AMPL melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil program dan kegiatan.
2. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
3. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
4. Kepala SKPD melalui Tim Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
5. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Pokja AMPL.
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD.
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

3.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL di Kabupaten Pati secara umum dilakukan oleh Tim Pokja AMPL/TKK dan secara khusus dilakukan oleh masing-masing SKPD serta stakeholders bidang AMPL. Formulir yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL yang dilakukan oleh Tim Pokja AMPL/TKK adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

EVALUASI HASIL RENCANA AKSI DAERAH AMPL

KABUPATEN PATI

PERIODE PELAKSANAAN :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										SKPD Penanggung Jawab																						
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																											
Predikat kinerja																																																											
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																																											
Faktor penghambat:																																																											
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																																																											
Usulan tindak lanjut pada RAD AMPL berikutnya:																																																											

....., tanggal

Pokja RAD AMPL/TKK

KABUPATEN PATI

()

Mengetahui

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PATI

()

Menyetujui

....., tanggal

BUPATI PATI

()

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Pati ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tercapainya target-target MDGs di tingkat Nasional khususnya untuk target 7c yang digambarkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tahun 2010.

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pati, khususnya masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Pati mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target 7C MDGs Kabupaten Pati.

Keberhasilan RAD AMPL ini tentu saja sangat tergantung dari dukungan pendanaan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat. Terkait dengan hal ini dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi *Budgeting* dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat penting artinya untuk menjamin keberhasilan implementasi program dan kegiatan RAD AMPL ini.

Selain partisipasi dalam pendanaan guna mendukung tercapainya target-target RAD AMPL, peran swasta dan masyarakat dalam hal ini LSM, Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian target MDGs, tentu saja sesuai dengan koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Pati mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Pati menuju sasaran MDGs yang disepakati selama 2011-2015.

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

TABEL
MATRIKS RAD AMPL SESUAI MATRIK UNTUK RAD MDGs
KABUPATEN PATI
TAHUN 2011 - 2015

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Nasional								7.420.544,10	36.311.064,45	21.343.950,43	19.218.787,33	27.839.399,69		
Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat														
1. Program Pamsimas Komponen B	Terlaksananya program Pamsimas Komponen B	91,52%	100%	100%	100%	100%	100%	335.630,00	352.411,50	370.032,75	388.533,69	407.960,38	APBN	Dinkes
Program 2: Program perencanaan sosial dan budaya														
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kab Pati	Terealisasinya bantuan keuangan kepada masyarakat Desa lokasi Program Pamsimas Kab Pati	38 desa	14 Desa	16 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	2.695.000,00	3.080.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	APBN	DPU
Program 3: Lingkungan Sehat Perumahan														
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin	15 desa	27 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	3.552.669,10	4.078.990,45	4.078.990,45	4.078.990,45	4.078.990,45	APBN	DPU
Program 4: Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku														
1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran Pembawa	Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa			73 desa	45 desa	55 desa	64 desa		3.685.000,00	4.237.750,00	4.873.412,50	5.604.424,38	APBN	DPU
Program 5: Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya														
1. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			20 desa	25 desa	30 desa	29 desa		22.000.000,00	6.225.000,00	4.900.000,00	12.500.000,00	APBN	DPU
Program 6: Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar														
1. Penyusunan DED dan masterplan Air Limbah	Terlaksananya penyusunan DED dan Masterplan Air Limbah			10 buku	10 buku				500.000,00	500.000,00			APBN	Bappeda

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
2. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya penyusunan Strategi PPIP			10 buku	10 buku				450.000,00	450.000,00			APBN	Bappeda
3. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas	Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan kawasan pengembangan kawasan permukiman prioritas				10 buku					690.000,00			APBN	Bappeda
4. Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan dan DED	Terlaksananya penyusunan teknis manajemen persampahan dan DED			10 buku					500.000,00				APBN	Bappeda
5. Penyusunan Master Plan Drainase	Terlaksananya penyusunan master plan drainase			10 buku					500.000,00				APBN	Bappeda
Program 7: Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah														
1. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan sumber daya air (WISMP)	Terlaksananya perkuatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi	11 daerah irigasi	10 daerah irigasi	10 daerah irigasi	10 daerah irigasi	10 daerah irigasi			243.693,00	268.062,30	294.868,53	324.355,38	APBN	Bappeda
Program 8: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam														
1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air (DAK)	Pembuatan sumur resapan air	18 sumur resapan	80%	80%	80%	90%	90%	50.625,00	55.687,50	64.040,63	73.646,72	88.376,06	APBN	BLH
2. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber - Sumber Air (DAK)	Terjaganya pelestarian fungsi sumber - sumber air	3 kec, 15000 bibit	4 kec	4 kec	5 kec	6 kec	7 kec	22.500,00	24.750,00	28.462,50	32.731,88	39.278,25	APBN	BLH
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (DAK)	Terkendalnya dampak perubahan iklim melalui perluasan RTH		30%	50%	60%	70%	70%	56.250,00	61.875,00	71.156,25	81.829,69	98.195,63	APBN	BLH
Program 9: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup														
1. Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan daerah	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup	20 buku laporan, 20 buku data	70%	80%	80%	90%	90%	186.125,00	204.737,50	235.448,13	270.765,34	324.918,41	APBN	BLH

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
2. Peningkatan Pembelajaran Lingkungan Hidup (cukai)	Tersampainya informasi LH di 2 lokasi dan tersedianya bahan guna penyampaian informasi LH		30%	40%	50%	60%	70%	60.000,00	66.000,00	75.900,00	87.285,00	104.742,00	APBN	BLH
3. Pembangunan percontohan Biogas	Percontohan teknologi biogas	4 kec	6 kec	6 kec	6 kec	6 kec	6 kec	291.745,00	320.919,50	369.057,43	424.416,04	509.299,25	APBN	BLH
Program 10: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup														
1. Pengkajian dampak lingkungan (cukai)	Dokumen pengkajian dampak lingkungan pada masyarakat disekitar pabrik rokok	20%	20%	40%	50%	60%	70%	40.000,00	44.000,00	50.600,00	58.190,00	66.918,50	APBN	BLH
Program 11: pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)														
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH (CUKAI)	Tertanamnya tanaman produktif (RTH) dan tersedianya sumur resapan di desa yang terkena dampak industri rokok	2070 bibit	30%	40%	50%	60%	70%	130.000,00	143.000,00	164.450,00	189.117,50	226.941,00	APBN	BLH
PROVINSI JAWA TENGAH								-	5.885.000,00	7.002.000,00	7.526.000,00	8.874.000,00		
Program 1: Lingkungan Sehat Perumahan														
1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi masyarakat miskin	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin	7 desa		8 desa	7 desa	7 desa	8 desa		4.785.000,00	5.502.000,00	6.326.000,00	7.274.000,00	APBD Provinsi	DPU
Program 2: Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya														
1. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			10 desa	12 desa	11 desa	9 desa		1.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	APBD Provinsi	DPU

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
KABUPATEN PATI								2.812.734,90	16.990.061,98	19.270.022,23	17.612.172,11	19.818.872,66		
DINAS KESEHATAN								405.727,00	1.305.431,50	1.349.034,75	1.891.013,63	1.424.924,64		
Program 1: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat														
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersebarluasnya informasi bahaya rokok pada masyarakat	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	98.466,00	108.312,00	119.143,00	131.057,00	144.162,00	APBD Kab	Dinkes
2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Cakupan pelayanan promkes pada masyarakat akibat dampak buruk merokok terpenuhi	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	406 desa/ke	118.374,00	130.211,00	143.232,00	157.555,00	173.310,00	APBD Kab	Dinkes
Program 2: Pengembangan Lingkungan Sehat														
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya dokumen rencana pengembangan lingkungan sehat			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	APBD Kab	Dinkes
2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Pengembangan klinik sanitasi	10 pus, 30 KK	15 pus, 45 kk	15 pus, 45 kk	15 pus, 45 kk	15 pus, 45 kk	15 pus, 45 kk	46.450,00	46.450,00	51.095,00	562.045,00	61.824,95	APBD Kab	Dinkes
3. Upaya Penyehatan Lingkungan Permukiman	Desa melaksanakan aktivitas penyebaran informasi STBM	12 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	APBD Kab	Dinkes
	Tim Kecamatan mengetahui progres Pamsimas	12 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec							
	Desa yang meningkatkan jumlah kepemilikan jamban keluarga	12 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa							
	Tenaga kesehatan terlatih dalam pelatihan Pamsimas	48 org	8 org	8 org	8 org	8 org	8 org							
4. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terselenggaranya pertemuan sosialisasi STBM			1 kl	1 kl	1 kl	1 kl		3.700,50	4.070,55	4.477,61	4.925,37	APBD Kab	Dinkes
	Terselenggaranya workshop STBM	1 kl		1 kl	1 kl	1 kl	1 kl		3.432,00	3.775,20	4.152,72	4.567,99		
	Terlaksananya pemicuan CLTS	24 kl		58 kl	87 kl	116 kl	145 kl		23.650,00	37.840,00	41.624,00	45.786,40		
	Terlaksananya monev STBM			29 kl	29 kl	29 kl	29 kl		2.030,00	2.233,00	2.456,30	2.701,93		
5. Inspeksi sanitasi sarana air minum dan sanitasi	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi IS sarana air minum dan sanitasi			2	2	2	2		7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	APBD Kab	Dinkes

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Terlaksananya IS sarana air minum dan sanitasi			145	145	145	145		10.295,0	10.295,0	10.295,0	10.295,0		
	Pemeriksaan sampel air minum			160 spl	160 spl	160 spl	160 spl		12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0		
6. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)			2 dok					100.000,00				APBD Kab	Dinkes
	Terlaksananya Pendampingan Program PPSP				1 keg	1 keg	1 keg			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Program 3: pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
1. Pelayanan pencegahan dan pengulangan penyakit menular	Terlaksananya penanganan P2TB	29 puskesmas, 5 RS	29 puskesmas, 5 RS	29 puskesmas, 5 RS	29 puskesmas, 5 RS	29 puskesmas, 5 RS	29 puskesmas, 5 RS	99.117,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	APBD Kab	Dinkes
	Terlaksananya penanganan P2Kusta	29 puskesmas		92%	92%	92%	95%		12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50		
	Terlaksananya penanganan P2DBD	29 puskesmas, 5 RS		100%	100%	100%	100%		565.800,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00		
	Terlaksananya penanganan P2ISPA	29 puskesmas		100%	100%	100%	100%		5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00		
	Terlaksananya penanganan P2Diare	29 puskesmas		100%	100%	100%	100%		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		
	Terlaksananya penanganan P2Malaria	29 puskesmas		100%	100%	100%	100%		51.874,50	51.874,50	51.874,50	51.874,50		
	Terlaksananya penanganan P2Filariasis	29 puskesmas		90%	90%	90%	90%		20.565,00	20.565,00	20.565,00	20.565,00		
2. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Surveilans (pelacakan kasus potensial KLB)	29 puskesmas, 6 RS		29 puskesmas, 6 RS	29 puskesmas, 6 RS	29 puskesmas, 6 RS	29 puskesmas, 6 RS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	APBD Kab	Dinkes
DPU								1.157.899,90	13.730.292,48	15.430.042,48	13.418.816,73	15.827.408,42		
Program 1: Lingkungan Sehat Perumahan														
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin	15 desa	27 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	130.899,90	150.292,48	150.292,48	150.292,48	150.292,48	APBD Kab	DPU

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

[illegible]

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
BAPPEDA								164.608,00	634.038,00	1.054.900,00	831.265,00	1.043.766,50		
Program 1: Perencanaan Tata Ruang														
1. Rencana tata ruang prioritas pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Margoyoso	Dokumen tata ruang prioritas pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Margoyoso				10 buku					150.000,00			APBD Kab	Bappeda
2. Penyusunan rencana tata ruang kawasan rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen rencana tata ruang kawasan rawan pencemaran dan kerusakan				10 buku					150.000,00			APBD Kab	Bappeda
3. Studi perencanaan pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Pati	Dokumen perencanaan pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Pati					10 buku					150.000,00		APBD Kab	Bappeda
4. Penyusunan studi identifikasi kawasan kumuh perkotaan	Tersusunnya studi identifikasi kawasan kumuh perkotaan						20 buku					200.000,00	APBD Kab	Bappeda
Program 2: Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar														
1. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Bidang PU/Cipta Karya	Tersusunnya RPIJM Cika 2012-2014 (review) dan 2015-2019 serta Memorandum Program			10 buku			10 buku		75.000,00			150.000,00	APBD Kab	Bappeda
2. Penyusunan DED sistem penyediaan air minum (SPAM)	Tersusunnya Masterplan dan DED SPAM			10 buku	10 buku	10 buku	10 buku		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	APBD Kab	Bappeda
3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)			2 dok					100.000,00				APBD Kab	Bappeda
	Terlaksananya Pendampingan Program PPSP				1 keg	1 keg	1 keg			300.000,00	200.000,00	200.000,00		
Program 3: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah														
1. Pembinaan Perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air	Terlaksananya perkuatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi	11 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	79.608,00	114.038,00	113.650,00	125.015,00	137.516,50	APBD Kab	Bappeda
2. Implementasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)	Terlaksananya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air		2 kali	4 kali	4 kali	5 kali	5 kali	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	APBD Kab	Bappeda

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Program 4: Perencanaan Sosial dan Budaya														
1. Perencanaan dan Pengelolaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan program Pamsimas	38 desa	14 desa reguler, 2 desa replikasi	16 desa reguler, 2 desa replikasi	18 desa reguler, 2 desa replikasi	18 desa reguler, 2 desa replikasi	18 desa reguler, 2 desa replikasi	55.000,00	60.000,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	APBD Kab	Bappeda
2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Prasarana Air Bersih Perdesaan	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola prasarana air bersih perdesaan	35 desa	35 desa	35 desa	40 desa	50 desa	50 desa	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	APBD Kab	Bappeda
Program 5: Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam														
1. Penyusunan studi kelayakan pembangunan embung	Tersusunnya studi kelayakan pembangunan embung			10 buku	10 buku	10 buku	10 buku		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	APBD Kab	Bappeda
BADAN LINGKUNGAN HIDUP								155.500,00	203.300,00	228.545,00	257.576,75	296.273,10		
Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup														
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya operasional program Adipura	80%	80%	80%	90%	90%	90%	80.000,00	88.000,00	101.200,00	116.380,00	133.837,00	APBD Kab	BLH
2. Koordinasi pengelolaan proksh / superkasih	Terwujudnya kebersihan di lingkungan sungai	17 sungai	75%	75%	75%	80%	80%	20.000,00	22.000,00	25.300,00	29.095,00	34.914,00	APBD Kab	BLH
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rancangan peraturan bupati	1 Perda Sampah	50%	60%	70%	80%	80%	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.273,75	8.728,50	APBD Kab	BLH
Program 2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam														
1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terselenggaranya seminar mengenai pengendalian dampak perubahan iklim	1 kali	80%	90%	100%	100%	100%	10.000,00	11.000,00	12.650,00	14.547,50	17.457,00	APBD Kab	BLH
2. Koordinasi Pengelolaan konservasi SDA	Terselenggaranya operasional program MIH (Menuju Indonesia Hijau)	4 dokumen	80%	80%	90%	90%	90%	5.000,00	5.500,00	6.325,00	7.273,75	8.728,50	APBD Kab	BLH

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Tersedianya pupuk organik tanaman makadamia	2100 kg pupuk	100%					2.500,00					APBD Kab	BLH
Program 3: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup														
1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di sekolah - sekolah		60%	60%	70%	70%	80%	10.000,00	11.000,00	12.650,00	14.547,50	17.457,00	APBD Kab	BLH
2. Penyediaan Kotak Pengaduan dan Informasi Lingkungan	beroperasinya kotak pengaduan dan informasi lingkungan hidup 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.000,00	8.800,00	10.120,00	11.638,00	13.965,60	APBD Kab	BLH
3. Penyusunan data dan Informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan kualitas air sungai	1 sungai (Sani)	70%	70%	80%	80%	80%	15.000,00	16.500,00	18.975,00	21.821,25	26.185,50	APBD Kab	BLH
4. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)			2 dok					35.000,00				APBD Kab	BLH
	Terlaksananya Pendampingan Program PPSP				1 keg	1 keg	1 keg			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
SEKRETARIAT DAERAH (HUMAS)								-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Program 1: Pelayanan Informasi Publik														
1. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).			2 dok					15.000,00				APBD Kab	Setda (Humas)
	Terlaksananya Pendampingan Program PPSP				1 keg	1 keg	1 keg			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
BAPERMADES								929.000,00	1.102.000,00	1.192.500,00	1.198.500,00	1.211.500,00		
Program 1: Bantuan Sosial														
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas Kab. Pati	Penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan	38 desa	14 reguler dan 2 replikasi	16 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	825.000,00	880.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	APBD Kab	Baperma-des

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Program 2: Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan														
1. Pelembagaan BP SPAM Pamsimas	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan BP SPAM Pamsimas			54 BP SPAM	72 BP SPAM	92 BP SPAM	112 BP SPAM		33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	APBD Kab	Baperma-des
Program 3: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa														
1. Pembangunan sarana dan prasarana umum pedesaan (BOP Pamsimas)	Terselenggaranya program Pamsimas pada Perdesaan Pamsimas)	38 desa	14 reguler dan 2 replikasi	16 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	18 reguler dan 2 replikasi	60.000,00	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	APBD Kab	Baperma-des
2. Pengadaan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) Replikasi Pamsimas Kab. Pati	Pelaksanaan Program Pamsimas Replikasi di Kabupaten Pati		3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	44.000,00	49.000,00	56.000,00	62.000,00	75.000,00	APBD Kab	Baperma-des
3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)			2 dok					25.000,00				APBD Kab	Baperma-des
	Terlaksananya Pendampingan Program PPSP				1 keg	1 keg	1 keg			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Program 4: peningkatan peran perempuan di pedesaan														
1. Bantuan Jamban Masyarakat P2MBG	Terpenuhinya jamban sehat lokasi P2MBG (1 desa)	30 jamban		32 jamban	30 jamban	30 jamban	30 jamban		55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	APBD Kab	Baperma-des
Stakeholders AMPL Kabupaten Pati								28.150.917,34	28.260.917,34	45.943.417,34	47.068.417,34	47.068.417,34		
MASYARAKAT								16.473.417,34	16.583.417,34	16.693.417,34	16.693.417,34	16.693.417,34		
Program 1: Pengadaan Sarana Air Minum dan Sanitasi														
1. Pembangunan sarana air minum mandiri	Pembangunan sarana air minum secara mandiri oleh masyarakat													
	a. Perkotaan (jiwa)		360	360	360	360	360	125.878,42	125.878,42	125.878,42	125.878,42	125.878,42	Masyara-kat	Masyara-kat Mandiri
	b. Perdesaan (jiwa)		24.193	24.193	24.193	24.193	24.193	8.467.438,30	8.467.438,30	8.467.438,30	8.467.438,30	8.467.438,30		

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup														
Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2010)	Capaian Kinerja					Alokasi Anggaran (000)					Sumber Pendana an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
2. Pembangunan sarana sanitasi dasar mandiri	Pembangunan sarana sanitasi dasar secara mandiri oleh masyarakat		46.667	46.667	46.667	46.667	46.667	7.000.100,63	7.000.100,63	7.000.100,63	7.000.100,63	7.000.100,63	Masyara- kat	Masyara- kat Mandiri
3. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Program Pamsimas)												Masyara- kat	LKM
	a. Incash	38 desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	176.000,00	198.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
	b. In kind	38 desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	704.000,00	792.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00		
PDAM KAB. PATI								11.677.500,00	11.677.500,00	29.250.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00		
Program 1: Penambahan sambungan rumah PDAM														
1. Penambahan SR di Kab. Pati	Terpasangnya SR di Kab. Pati	20.738 SR dan 136 HU	5.190	5.190	4.500	5.000	5.000	11.677.500,00	11.677.500,00	10.125.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	PDAM	PDAM
	Terpasangnya SR SPAM Regional				8.500	8.500	8.500			19.125.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00	APBD Kab & PDAM	PDAM
TOTAL								38.384.196,34	87.447.043,77	93.559.390,00	91.425.376,78	103.600.689,69		

TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RAD AMPL
KABUPATEN PATI
TAHUN 2011 - 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 02 1.02.01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat															
1 02 1.02.01 19 01	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersebarluasnya informasi bahaya rokok pada masyarakat	406 desa/ke	406 desa/ke	98.466,00	406 desa/ke	108.312,00	406 desa/ke	119.143,00	406 desa/ke	131.057,00	406 desa/ke	144.162,00	406 desa/ke	601.140,00	Dinkes
1 02 1.02.01 19 02	2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Cakupan pelayanan promkes pada masyarakat akibat dampak buruk merokok terpenuhi	406 desa/ke	406 desa/ke	118.374,00	406 desa/ke	130.211,00	406 desa/ke	143.232,00	406 desa/ke	157.555,00	406 desa/ke	173.310,00	406 desa/ke	722.682,00	Dinkes
1 02 1.02.01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat															
1 02 1.02.01 21 01	1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya dokumen rencana pengembangan lingkungan sehat				1 dok	10.000,00	1 dok	10.000,00	1 dok	10.000,00	1 dok	10.000,00	4 dok	40.000,00	Dinkes
1 02 1.02.01 21 02	2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Pengembangan klinik sanitasi	10 pus, 30 KK	15 pus, 45 kk	46.450,00	15 pus, 45 kk	46.450,00	15 pus, 45 kk	51.095,00	15 pus, 45 kk	562.045,00	15 pus, 45 kk	61.824,95	15 pus, 225 kk	767.864,95	Dinkes
1 02 1.02.01 21 05	3. Upaya Penyehatan Lingkungan Permukiman	Desa melaksanakan aktivitas penyebaran informasi STBM	12 desa	2 desa	43.320,00	2 desa	43.320,00	2 desa	43.320,00	2 desa	43.320,00	2 desa	43.320,00	10 desa	216.600,00	Dinkes
		Tim Kecamatan mengetahui progres Pamsimas	12 kec	2 kec		2 kec		2 kec		2 kec		2 kec		10 kec		
		Desa yang meningkatkan jumlah kepemilikan jamban keluarga	12 desa	2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		10 desa		
		Tenaga kesehatan terlatih dalam pelatihan Pamsimas	48 org	8 org		8 org		8 org		8 org		8 org		40 org		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 02 1.02.01 21 xx	4. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terselenggaranya pertemuan sosialisasi STBM				1 kl	3.700,50	1 kl	4.070,55	1 kl	4.477,61	1 kl	4.925,37	4 kl	17.174,02	Dinkes
		Terselenggaranya workshop STBM	1 kl			1 kl	3.432,00	1 kl	3.775,20	1 kl	4.152,72	1 kl	4.567,99	4 kl	15.927,91	
		Terlaksananya pemicuan CLTS	24 kl			58 kl	23.650,00	87 kl	37.840,00	116 kl	41.624,00	145 kl	45.786,40	406 kl	148.900,40	
		Terlaksananya monev STBM				29 kl	2.030,00	29 kl	2.233,00	29 kl	2.456,30	29 kl	2.701,93	116 kl	9.421,23	
1 02 1.02.01 21 xx	5. Inspeksi sanitasi sarana air minum dan sanitasi	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi IS sarana air minum dan sanitasi				2	7.314,00	2	7.314,00	2	7.314,00	2	7.314,00	8	29.256,00	Dinkes
		Terlaksananya IS sarana air minum dan sanitasi				145	10.295,0	145	10.295,00	145	10.295,00	145	10.295,00	580	41.180,00	
		Pemeriksaan sampel air minum				160 spl	12.000,0	160 spl	12.000,00	160 spl	12.000,00	160 spl	12.000,00	640 spl	48.000,00	
1 02 1.02.01 21 xx	6. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	100.000,00							2 dok	100.000,00	Dinkes
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	100.000,00	1 keg	100.000,00	1 keg	100.000,00	3 keg	300.000,00	
1 02 1.02.01 22	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular															
1 02 1.02.01 22 05	1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya penanganan P2TB	29 pus, 5 RS	29 pus, 5 RS	99.117,00	29 pus, 5 RS	100.000,00	29 pus, 5 RS	100.000,00	29 pus, 5 RS	100.000,00	29 pus, 5 RS	100.000,00	29 pus, 5 RS	499.117,00	Dinkes
		Terlaksananya penanganan P2Kusta	29 pus			92%	12.187,50	92%	12.187,50	92%	12.187,50	95%	12.187,50	95%	48.750,00	
		Terlaksananya penanganan P2DBD	29 pus, 5 RS			100%	565.800,00	100%	565.800,00	100%	565.800,00	100%	565.800,00	100%	2.263.200,00	
		Terlaksananya penanganan P2ISPA	29 pus			100%	5.440,00	100%	5.440,00	100%	5.440,00	100%	5.440,00	100%	21.760,00	
		Terlaksananya penanganan P2Diare	29 pus			100%	8.850,00	100%	8.850,00	100%	8.850,00	100%	8.850,00	100%	35.400,00	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya penanganan P2Malaria	29 puskesmas			100%	51.874,50	100%	51.874,50	100%	51.874,50	100%	51.874,50	100%	207.498,00	
		Terlaksananya penanganan P2Filariasis	29 puskesmas			90%	20.565,00	90%	20.565,00	90%	20.565,00	90%	20.565,00	90%	82.260,00	
1 02 1.02.01 22 09	2. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Surveilans (pelacakan kasus potensial KLB)	29 puskesmas, 6 RS			29 puskesmas, 6 RS	40.000,00	29 puskesmas, 6 RS	40.000,00	29 puskesmas, 6 RS	40.000,00	29 puskesmas, 6 RS	40.000,00	29 puskesmas, 6 RS	160.000,00	Dinkes
1 04 1.03.01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan															
1 04 1.03.01 16 02	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin	15 desa	27 desa	130.899,90	31 desa	150.292,48	31 desa	150.292,48	31 desa	150.292,48	31 desa	150.292,48	151 desa	732.069,82	DPU
1 04 1.03.01 16 04	2. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Terlaksananya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	85%	85%	350.000,00	85%	402.500,00	85%	462.875,00	85%	532.306,25	85%	612.152,19	85%	2.359.833,44	DPU
1 04 1.03.01 16 xx	3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	75.000,00							2 dok	75.000,00	DPU
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	75.000,00	1 keg	75.000,00	1 keg	75.000,00	3 keg	225.000,00	
1 03 1.03.01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya															
1 03 1.03.01 24 19	1. Fasilitasi pendukung kegiatan WISMP	Terwujudnya fasilitas pendukung kegiatan WISMP	3 paket	4 Daerah Irigasi	567.000,00	7 Daerah Irigasi	1.000.000,0	7 Daerah Irigasi	1.000.000,0	7 Daerah Irigasi	1.000.000,0	7 Daerah Irigasi	1.000.000,0	32 DI	4.567.000,00	DPU
1 03 1.03.01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku															
1 03 1.03.01 25 01	1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran Pembawa	Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa	36 desa			20 desa	5.330.000,0	50 desa	6.129.500,00	75 desa	7.048.925,00	100 desa	8.106.263,75	245 desa	26.614.688,75	DPU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 03 1.03.01 25 06	2. Peningkatan Distribusi Air Baku	Terselenggaranya distribusi air baku	1 paket	1 paket	50.000,00	1 paket	57.500,0	1 paket	66.125,00	1 paket	76.043,00	1 paket	87.450,00	5 paket	337.118,00	DPU
1 03 1.03.01 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya															
1 03 1.03.01 26 01	1. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terwujudnya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya				21 kec	6.435.000,00	12 desa	6.750.000,00	10 desa	3.600.000,00	11 desa	4.800.000,00	21 kec dan 33 desa	21.585.000,00	DPU
1 03 1.03.01 26 02	2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung air lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya				21 kec	220.000,00	5 desa	700.000,00	6 desa	840.000,00	9 desa	900.000,00	21 kec dan 20 desa	2.660.000,00	DPU
1 03 1.03.01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah															
1 03 1.03.01 27 10	1. Pengelolaan program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Terselenggaranya program Pamsimas di Kab. Pati	38 desa	14 reguler dan 2 replikasi	60.000,00	16 reguler dan 2 replikasi	60.000,0	18 reguler dan 2 replikasi	96.250,00	18 reguler dan 2 replikasi	96.250,00	18 reguler dan 2 replikasi	96.250,00	84 reguler dan 10 replikasi	408.750,00	DPU
1 06 1.06.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang															
1 06 1.06.01 15 xx	1. Rencana tata ruang prioritas pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Margoyoso	Dokumen tata ruang prioritas pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Margoyoso						10 buku	150.000,00					10 buku	150.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 15 xx	2. Penyusunan rencana tata ruang kawasan rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen rencana tata ruang kawasan rawan pencemaran dan kerusakan						10 buku	150.000,00					10 buku	150.000,00	Bappeda

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penangung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 1.06.01 15 xx	3. Studi perencanaan pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Pati	Dokumen perencanaan pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Pati								10 buku	150.000,00			10 buku	150.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 15 xx	4. Penyusunan studi identifikasi kawasan kumuh perkotaan	Tersusunnya studi identifikasi kawasan kumuh perkotaan										20 buku	200.000,00	20 buku	200.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar															
1 06 1.06.01 19 17	1. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Bidang PU/Cipta Karya	Tersusunnya RPIJM Cika 2012-2014 (review) dan 2015-2019 serta Memorandum Program				10 buku	75.000,00					10 buku	150.000,00	20 buku	225.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 19 xx	2. Penyusunan DED sistem penyediaan air minum (SPAM)	Tersusunnya Masterplan dan DED SPAM				10 buku	150.000,00	10 buku	100.000,00	10 buku	100.000,00	10 buku	100.000,00	40 buku	450.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 19 xx	3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	100.000,00							2 dok	100.000,00	Bappeda
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	300.000,00	1 keg	200.000,00	1 keg	200.000,00	3 keg	700.000,00	
1 06 1.06.01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah															
1 06 1.06.01 20 04	1. Pembinaan Perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air	Terlaksananya perkuatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi	11 Daerah Irigasi	10 Daerah Irigasi	79.608,00	10 Daerah Irigasi	114.038,00	10 Daerah Irigasi	113.650,00	10 Daerah Irigasi	125.015,00	10 Daerah Irigasi	137.516,50	40 Daerah Irigasi	569.827,50	Bappeda
1 06 1.06.01 20 05	2. Implementasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)	Terlaksananya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air		2 kali	10.000,00	4 kali	15.000,00	4 kali	15.000,00	5 kali	20.000,00	5 kali	20.000,00	20 kali	80.000,00	Bappeda

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 1.06.01 23	Program 3: Perencanaan Sosial dan Budaya															
1 06 1.06.01 23 08	1. Perencanaan dan Pengelolaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)'	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan program Pamsimas	38 desa	14 desa reguler, 2 desa replikasi	55.000,00	16 desa reguler, 2 desa replikasi	60.000,00	18 desa reguler, 2 desa replikasi	96.250,00	18 desa reguler, 2 desa replikasi	96.250,00	18 desa reguler, 2 desa replikasi	96.250,00	84 desa reguler, 10 desa replikasi	403.750,00	Bappeda
1 06 1.06.01 23 17	2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Prasarana Air Bersih Pedesaan	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola prasarana air bersih pedesaan	35 desa	35 desa	20.000,00	35 desa	20.000,00	40 desa	30.000,00	50 desa	40.000,00	50 desa	40.000,00	210 desa	150.000,00	Bappeda
1 06 1.06.01 24	Program 4: Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam															
1 06 1.06.01 24 04	1. Penyusunan studi kelayakan pembangunan embung	Tersusunnya studi kelayakan pembangunan embung				10 buku	100.000,0	10 buku	100.000,0	10 buku	100.000,0	10 buku	100.000,0	40 buku	400.000,00	Bappeda
1 08 1.08.01 16 xx	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup															
1 08 1.08.01 16 01	1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya operasional program Adipura	80%	80%	80.000,00	80%	88.000,00	90%	101.200,00	90%	116.380,00	90%	133.837,00	90%	519.417,00	BLH
1 08 1.08.01 16 10	2. Koordinasi pengelolaan proksh / superkasih	Terwujudnya kebersihan di lingkungan sungai	17 sungai	75%	20.000,00	75%	22.000,00	75%	25.300,00	80%	29.095,00	80%	34.914,00	80%	131.309,00	BLH
1 08 1.08.01 16 12	3. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rancangan peraturan bupati	1 Perda Sampah	50%	5.000,00	60%	5.500,00	70%	6.325,00	80%	7.273,75	80%	8.728,50	80%	32.827,25	BLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 08 1.08.01 17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam															
1 08 1.08.01 17 05	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terselenggaranya seminar mengenai pengendalian dampak perubahan iklim	1 kali	80%	10.000,00	90%	11.000,00	100%	12.650,00	100%	14.547,50	100%	17.457,00	100%	65.654,50	BLH
1 08 1.08.01 17 09	1. Koordinasi Pengelolaan konservasi SDA	Terselenggaranya operasional program MIH (Menuju Indonesia Hijau)	4 dok	80%	5.000,00	80%	5.500,00	90%	6.325,00	90%	7.273,75	90%	8.728,50	90%	32.827,25	BLH
1 08 1.08.01 17 14	3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Tersedianya pupuk organik tanaman makadamia	2100 kg pupuk	100%	2.500,00									100%	2.500,00	BLH
1 08 1.08.01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup															
1 08 1.08.01 19 01	1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di sekolah - sekolah		60%	10.000,00	60%	11.000,00	70%	12.650,00	70%	14.547,50	80%	17.457,00	80%	65.654,50	BLH
1 08 1.08.01 19 07	2. Penyediaan Kotak Pengaduan dan Informasi Lingkungan	beroperasinya kotak pengaduan dan informasi lingkungan hidup 1 tahun	100%	100%	8.000,00	100%	8.800,00	100%	10.120,00	100%	11.638,00	100%	13.965,60	100%	52.523,60	BLH
1 08 1.08.01 19 13	3. Penyusunan data dan Informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan kualitas air sungai	1 sungai (Sani)	70%	15.000,00	70%	16.500,00	80%	18.975,00	80%	21.821,25	80%	26.185,50	80%	98.481,75	BLH
1 08 1.08.01 19 xx	4. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	35.000,00							2 dok	35.000,00	BLH
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	35.000,00	1 keg	35.000,00	1 keg	35.000,00	3 keg	105.000,00	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 20 1.20.03 15	Program 1: Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa															
1 20 1.20.03 15 xx	1. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	15.000,00							2 dok	15.000,00	Setda (Humas)
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	15.000,00	1 keg	15.000,00	1 keg	15.000,00	3 keg	45.000,00	
1 20 1.20.05 00 00	Program 1: Bantuan Sosial															
	1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas Kab. Pati	Penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan	38 desa	14 reguler dan 2 replikasi	825.000,00	16 reguler dan 2 replikasi	880.000,0	18 reguler dan 2 replikasi	935.000,00	18 reguler dan 2 replikasi	935.000,00	18 reguler dan 2 replikasi	935.000,00	84 reguler dan 10 replikasi	4.510.000,00	Baperma-des
1 22 1.22.01 15	Program 2: Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan															
1 22 1.22.01 15 04	1. Pelembagaan BP SPAM Pamsimas	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan BP SPAM				54 BP SPAM	33.000,0	72 BP SPAM	34.000,00	92 BP SPAM	34.000,00	112 BP SPAM	34.000,00	112 BP SPAM	135.000,00	Baperma-des
1 22 1.22.01 17	Program 3: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa															
1 22 1.22.01 17 10	1. Pembangunan sarana dan prasarana umum pedesaan (BOP Pamsimas)	Terselenggaranya program Pamsimas pada Perdesaan	38 desa	14 reguler dan 2 replikasi	60.000,00	16 reguler dan 2 replikasi	60.000,00	18 reguler dan 2 replikasi	82.500,00	18 reguler dan 2 replikasi	82.500,00	18 reguler dan 2 replikasi	82.500,00	84 reguler dan 10 replikasi	367.500,00	Baperma-des
1 22 1.22.01 17 11	2. Pengadaan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) Replikasi Pamsimas Kab. Pati	Pelaksanaan Program Pamsimas Replikasi di Kabupaten Pati	3 orang	3 orang	44.000,00	3 orang	49.000,00	3 orang	56.000,00	3 orang	62.000,00	3 orang	75.000,00	15 orang TFM	286.000,00	Baperma-des

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Kondisi Kinerja Akhir		SKPD Penangung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3. Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)				2 dok	25.000,00							2 dok	25.000,00	Baperma- des
		Terlaksananya Pendampingan Program PPSP						1 keg	25.000,00	1 keg	25.000,00	1 keg	25.000,00	3 keg	75.000,00	
1 22 1.22.01 19	Program 4: peningkatan peran perempuan di perdesaan															
1 22 1.22.01 19 02	1. Bantuan Jamban Masyarakat P2MBG	Terpenuhinya jamban sehat lokasi P2MBG (1 desa)	30 jamban			32 jamban	55.000,0	30 jamban	60.000,00	30 jamban	60.000,00	30 jamban	60.000,00	122 jamban (4 desa)	235.000,00	Baperma- des
JUMLAH					2.812.734,90		16.990.061,98		19.270.022,23		17.612.172,11		19.818.872,66		76.503.863,87	

**) Sumber: Tabel dalam RPJMD, sesuai Permendagri No 54/2010

Catatan: K = Target Kinerja

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO.S.H.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

Pj. BUPATI PATI,

TTD

Ign. INDRA SURYA